

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian daerah seringkali menunjukkan ketimpangan pembangunan. Kesulitan ini mungkin timbul akibat disparitas faktor jumlah penduduk dan sumber daya alam di berbagai wilayah. Oleh karena itu, setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memajukan perekonomian daerahnya.

Ketika mempertimbangkan strategi arah pembangunan, pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan daerah (Andiny & Mandasari, 2017). Selain itu, proses pertumbuhan dapat merata antar daerah karena tidak banyak permasalahan kemasyarakatan yang terjadi. Kesenjangan distribusi sumber daya—manusia, fisik, teknologi, dan modal—memiliki dampak makro terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ketimpangan pembangunan, setiap daerah memiliki keunikannya (Kamaruddin & Alam, 2019).

Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah kesenjangan pembangunan ekonomi antar provinsi. Perbedaan tingkat kesejahteraan ditunjukkan dengan terjadinya kesenjangan antar wilayah. Hal ini berarti bahwa beberapa daerah dan provinsi mengalami pertumbuhan yang pesat, sementara daerah dan provinsi lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Penyebab kondisi ini antara lain perbedaan demografi wilayah, ketersediaan sumber daya alam, konsentrasi kegiatan ekonomi (aglomerasi), dan mudah atau sulitnya transportasi barang dan jasa di dalam wilayah.

Kemajuan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunannya dapat

diukur dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, pembangunan ekonomi mengacu pada proses mengubah potensi ekonomi menjadi perekonomian yang berfungsi melalui investasi, penggunaan teknologi baru, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, serta pengembangan kemampuan organisasi dan manajerial (Heinrich et al. , n.d.). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

Ketika terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah, baik diukur secara absolut maupun dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan potensi masyarakat, maka akan timbul kesulitan. Biasanya terjadi disparitas kekayaan antar daerah atau antara pusat dengan daerah itu sendiri. Pasalnya, setiap daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. (Andiny & Mandasari, 2017)

Kesenjangan ekonomi antar daerah merupakan hal yang biasa terjadi dalam kegiatan daerah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh variasi kandungan sumber daya alam (SDA) dan faktor demografi di setiap lokasi. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam mendorong pembangunan juga berbeda-beda akibat perbedaan tersebut. Akibatnya, kesenjangan yang besar tidak hanya memperburuk ketegangan sosial yang ada namun juga menimbulkan ancaman terhadap kemajuan ekonomi di masa depan.

Pembangunan ekonomi harus dipahami sebagai proses yang memiliki banyak aspek termasuk berbagai perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional jika kita ingin terus berupaya mengatasi kesenjangan pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan pembangunan daerah secara seimbang sangat penting untuk mencegah terjadinya gerakan protes daerah

yang dapat berujung pada disintegrasi Indonesia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional, namun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan kebijakan pemerintah berfluktuasi antar daerah karena kondisi lokal yang unik. Variasi ini sebagian disebabkan oleh variasi regional dalam hal pertumbuhan penduduk, potensi sumber daya, dan aktivitas manusia. Kesenjangan ekonomi merupakan permasalahan di seluruh Indonesia, namun permasalahan yang lebih akut terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua karena besarnya wilayah dan melimpahnya sumber daya alam. Terdapat sejumlah persoalan mendesak di Wilayah Timur Indonesia, yang mencakup sepuluh provinsi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat) yang perlu diperbaiki. Permasalahan tersebut di antaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan data PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi tercatat bahwa sebanyak 23 dari 81 kabupaten/kota (23,4 persen) di Pulau Sulawesi mencapai tingkat kesejahteraan minimal untuk bermukim di Pulau Sulawesi. Kabupaten Morowali dan Kota Makassar menjadi daerah dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Sejak era Orde Baru, Morowali sudah dikenal dengan potensi sektor pertambangannya yaitu bijih nikel. Sama seperti yang terjadi di Kabupaten Mimika, pengelolaan hasil alam tersebut membutuhkan investasi dari negara lain untuk memaksimalkan potensi produksinya secara berkala. Lain halnya dengan Kota Makassar yang dalam sejarahnya sudah menjadi bagian dari

masyarakat dunia hingga terkenal tentang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi nilai tambah daerah tersebut.

Berbagai permasalahan, seperti kesenjangan infrastruktur fisik antar kabupaten dan kota, menghambat upaya pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Ibu dan Loloda merupakan dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki infrastruktur fisik yang belum memadai, termasuk jalan raya dan kurangnya jaringan telekomunikasi yang handal. Mengingat potensi daerah dalam sektor pertambangan emas, maka penyerapan tenaga kerja lokal seharusnya lebih tinggi di Kabupaten Halmahera Utara. Namun kenyataannya sebagian besar serapan tenaga kerja berasal dari Pulau Jawa.

Konsentrasi perekonomian Kota Ternate yang relatif tinggi berarti kota ini akan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lain yang konsentrasinya lebih rendah, hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya disparitas pembangunan ekonomi. Pekerja industri pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah berasal dari seluruh Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk secara masif. Akibat kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah, PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) mewajibkan semua pelamar berdomisili di Halmahera Tengah atau terdaftar sebagai penduduk Halmahera Tengah. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu di Pulau Papua, sektor utama penyokong perekonomian masyarakatnya juga bersumber dari sektor pertambangan dan penggalian. Hasil alam yang superior berupa emas, perak dan tembaga, di Kabupaten Mimika

menjadi sumber pendapatan yang berefek langsung pada perekonomian Pulau Papua. Namun, pengelolaan hasil alam tersebut tentunya membutuhkan investasi dari negara lain untuk memaksimalkan potensi produksinya.

Indonesia Timur merupakan rumah bagi 84% daerah tertinggal di Indonesia, menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kurangnya pembangunan ekonomi menyebabkan masalah ini. Di bagian timur Indonesia, terdapat 102 dari 122 daerah tertinggal. Indonesia bagian barat dan tengah hanya memiliki dua puluh daerah miskin.

Terkait layanan listrik, masih ada 433 komunitas di Indonesia Timur yang tidak memiliki layanan listrik. Masing-masing kelompok tersebut mencakup 325 desa di Papua, 102 desa di Papua Barat, 5 desa di NTT, dan 1 desa di Maluku. Sementara itu, hanya 54% dari 14.265 masyarakat yang memiliki akses listrik yang benar-benar memanfaatkan PLN. Hanya 19,6% yang bergantung pada listrik yang terhubung ke jaringan listrik, 23,2% menggunakan sumber non-PLN, dan 3% tidak memiliki akses terhadap jaringan listrik sama sekali. Terkait koneksi internet, sebagian besar wilayah di 13.577 desa di Papua dan Papua Barat tidak memiliki koneksi internet. Lebih spesifiknya, terdapat 1.363 desa di Papua dan 4.506 di wilayah Papua Barat.

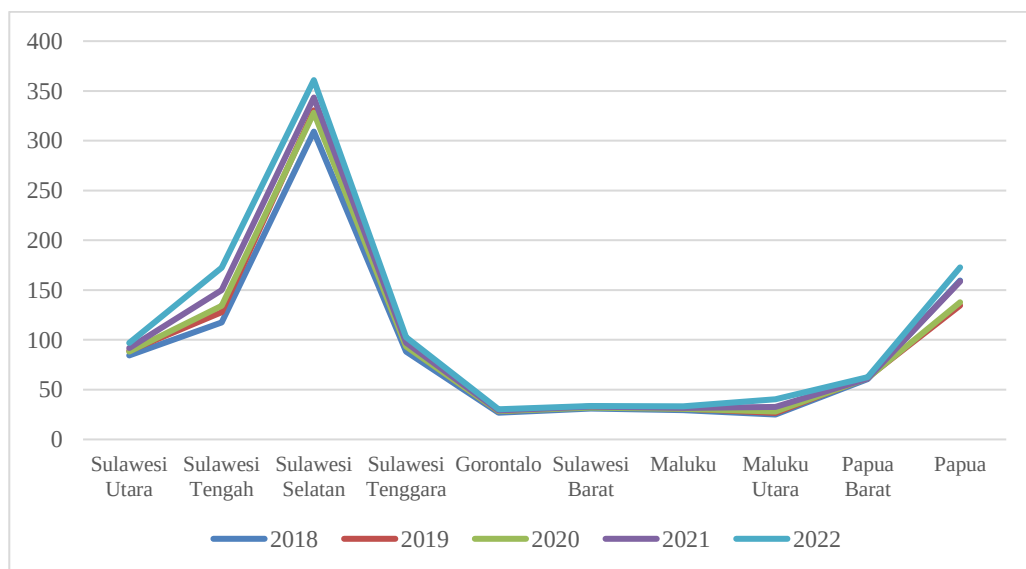
Kemajuan perekonomian Indonesia Timur terhambat oleh dua permasalahan ini saja. Masyarakat di daerah tertinggal memiliki akses yang terbatas, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pendidikan berbasis teknologi atau memulai atau mengembangkan usaha online.

Sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu bangsa atau daerah berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga hal ini menjadi salah

satu aspek krusial dalam pembangunan. Secara umum, pertumbuhan PDB di tingkat nasional dan pertumbuhan PDRB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan dua indikator utama pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah total nilai moneter dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh badan usaha dalam jangka waktu tertentu atau total nilai moneter seluruh perusahaan di suatu wilayah tertentu. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, kita dapat menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB yang disesuaikan dengan harga tertentu, yang disebut ADHK (PDRB Atas Dasar Harga Konstan).

Pada tahun 2018–2022, tabel berikut merinci PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dan laju pertumbuhan PDB (PDRB) provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua di Indonesia.



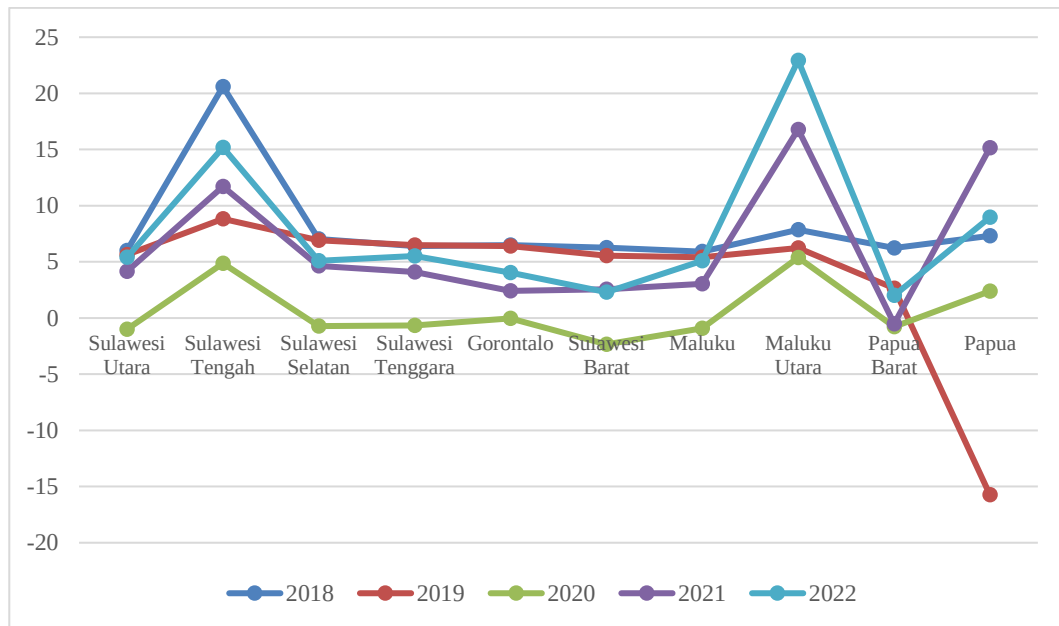
Sumber : BPS (diolah), 2023

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Triliun Rupiah) Tahun 2018 - 2022

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat setiap tahunnya di seluruh provinsi, seperti terlihat pada grafik 1.1 di atas. Kecuali Provinsi Papua pada tahun 2019 dan Provinsi Papua Barat pada tahun 2021, seluruh provinsi mengalami peningkatan PDRB ADHK pada tahun 2020, sedangkan tujuh dari sepuluh provinsi mengalami peningkatan.

Setiap provinsi di Wilayah Timur Indonesia mengalami peningkatan PDRB antara tahun 2018 dan 2022. Dari sepuluh provinsi tersebut, empat provinsi—Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara—memiliki PDRB di atas 100 triliun rupiah. Sementara itu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara menjadi empat provinsi yang memiliki PDRB ADHK di bawah 50 triliun rupiah. Kesenjangan besar dalam PDRB disebabkan oleh fakta bahwa setiap provinsi mempunyai potensi sumber daya yang unik, termasuk jumlah penduduk, luas lahan, serta potensi pertanian dan pertambangan. Para ilmuwan penasaran dengan alasan di balik variasi pertumbuhan PDRB dan kesenjangan ekonomi antar provinsi karena fakta ini menarik untuk ditelaah.

Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat bervariasi selama lima tahun terakhir. Selama ini, fluktuasi tingkat pertumbuhan PDRB hanya sedikit, hal ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian. Arah pertumbuhan ekonomi secara umum adalah positif dan berkelanjutan, meskipun terdapat beberapa pasang surut. Sulawesi Tengah dan Maluku Utara merupakan dua dari sepuluh provinsi yang tidak pernah mengalami pertumbuhan negatif antara tahun 2018 dan 2022.



Sumber : BPS (diolah), 2023

Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (%) Tahun 2018 - 2022

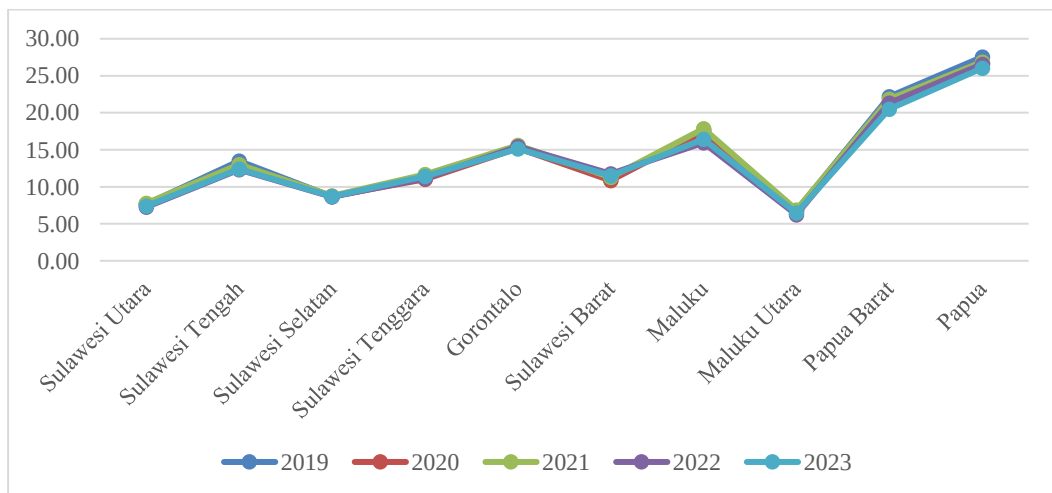
Salah satu dari banyak elemen yang berdampak pada situasi ini adalah peningkatan permintaan agregat di semua sektor ekonomi. Akibatnya, pendapatan masyarakat miskin hanyalah salah satu aspek dari kemiskinan; masih banyak lagi dimensi dalam situasi rumit ini. Terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan; seiring dengan kemajuan suatu negara melalui tahap-tahap pembangunannya, jumlah penduduk miskin cenderung menurun seiring berjalannya waktu.

Tingkat pertumbuhan yang sukses harus memotivasi pemerintah untuk mengambil pendekatan yang lebih praktis dalam menangani keuangan dan mengalokasikan dana untuk inisiatif ekonomi yang dapat mempercepat ekspansi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah harus meningkatkan upayanya untuk menerapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan, seperti meningkatkan

investasi, mendorong industri yang memiliki ruang untuk berkembang, dan menghilangkan hambatan terhadap pembangunan ekonomi.

Para analis ekonomi sepakat bahwa cara terbaik untuk keluar dari resesi adalah dengan mempercepat pembangunan ekonomi hingga melampaui peningkatan populasi. Jumlah penduduk miskin akan berkurang akibat peningkatan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Konotasi umum kemiskinan mencakup kelangkaan, kesulitan, dan kebutuhan.

Keterbelakangan, ketidaktahuan, penelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, dan pekerja anak hanyalah beberapa dari keprihatinan kemanusiaan yang dapat memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, isu pengentasan kemiskinan berkaitan dengan permasalahan sosial dan kemanusiaan yang lebih besar, bukan hanya permasalahan ekonomi.



Sumber : BPS (diolah), 2023

Gambar 3. Tingkat Kemiskinan Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (%) Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebutkan di atas, sejak tahun 2019 hingga pada tahun 2023 Provinsi Papua masih menempati posisi tertinggi dengan jumlah dan persentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 26,03% atau setara dengan 915,15 ribu jiwa. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara adalah yang terendah hanya sebesar 6,46%, yang setara dengan 83,8 ribu jiwa.

Provinsi lain yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Papua Barat dengan persentase 20,49% dan Provinsi Maluku sebesar 17,42%. Sementara itu meskipun Provinsi Maluku persentasenya lebih rendah dari Papua Barat namun jumlah penduduk miskinnya lebih banyak yaitu 301,61 ribu jiwa sedangkan Papua Barat 214,98 ribu jiwa. Adapun di Pulau Sulawesi, kemiskinan terendah (di bawah 10%) ada di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Dari kesepuluh Provinsi tersebut dapat kita lihat terdapat ketimpangan bahwa selisih kemiskinan tertinggi dengan yang terendah terpaut cukup jauh

Yang menjadi permasalahan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seringkali mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan mengintegrasikan indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan riil per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengevaluasi kemajuan sosio-ekonomi suatu negara atau wilayah. Keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah atau negara seringkali berkorelasi dengan HDI-nya.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	72,20	72,99	72,93	73,30	73,81
Sulawesi Tengah	68,88	69,50	69,55	69,79	70,28
Sulawesi Selatan	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82
Sulawesi Tenggara	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23
Gorontalo	67,01	68,49	68,68	69,00	69,81
Sulawesi Barat	65,10	65,73	66,11	66,36	66,92
Maluku	68,87	69,45	69,49	69,71	70,22
Maluku Utara	67,76	68,70	68,49	68,76	69,47
Papua Barat	63,74	64,70	65,09	65,26	65,89
Papua	60,06	60,84	60,44	60,62	61,39

Sumber : BPS (diolah), 2023

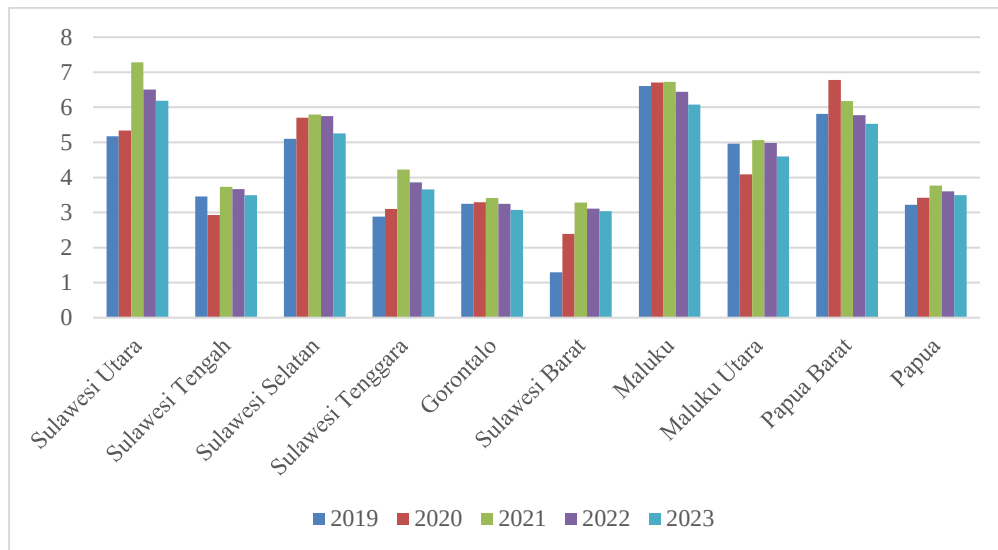
Pada tabel 1 indeks pembangunan manusia di empat Provinsi Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022. Selama kurun waktu 5 tahun kenaikan tertinggi terjadi pada provinsi Gorontalo yaitu sebesar 2,80% dan Papua Barat sebesar 2,15%, sedangkan provinsi yang kenaikannya paling rendah yaitu terjadi pada provinsi Maluku yaitu hanya 4,20%. Adapun Maluku Utara mengalami kenaikan IPM sebesar 5,03% selama kurun waktu 10 tahun.

Proses pembangunan di kawasan berjalan efektif, mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan yang merupakan tujuan akhir pembangunan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan nilai IPM. Salah satu cara untuk melihat sejauh mana kemajuan suatu negara atau daerah dalam hal pembangunan manusia adalah dengan melihat skor HDI-nya. Kesejahteraan ekonomi, pencapaian pendidikan, dan kesehatan hanyalah beberapa dari banyak bidang yang dicakup oleh berbagai

indikator HDI. Di sini dijelaskan lebih lanjut komponen ekonomi sebagai indikasi utama kemajuan pembangunan manusia suatu wilayah atau negara.

Oleh karena itu, peningkatan nilai IPM di empat wilayah Indonesia bagian timur menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia, khususnya di bidang ekonomi. Dampaknya, kesejahteraan penduduk provinsi ini, serta pendapatan, lapangan kerja, dan akses mereka terhadap sumber daya, mungkin akan meningkat. Pembangunan manusia di provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2022, sesuai dengan data di atas.

Jumlah angkatan kerja yang lebih besar memungkinkan output yang lebih banyak, yang pada gilirannya dimungkinkan karena populasi yang terus bertambah. Peningkatan output nasional dan aktivitas ekonomi, serta pergeseran dinamika populasi yang mendukung ekspansi ekonomi, merupakan tren yang sedang berkembang. Sumber daya manusia merupakan komponen kunci dari perekonomian yang berkembang. Karena manusia adalah kekuatan pendorong di belakang ekspansi ekonomi, efisiensi tenaga kerja sangat penting dalam ekspansi ekonomi.



Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (%) Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan gambar 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bergerak fluktuatif namun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 pola perkembangannya hampir sama untuk semua provinsi. Namun dari kesepuluh provinsi tersebut selama periode 5 tahun terakhir tampak disparitas yang sangat jelas dimana Maluku selalu berada pada posisi teratas yang artinya tingkat pengangguran terbukanya adalah yang tertinggi. Kemudian posisi kedua dan ketiga masing-masing adalah Sulawesi Utara dan Papua, sedangkan TPT yang terendah adalah Sulawesi Barat dan Gorontalo.

Meskipun Maluku selalu mengalami TPT Tertinggi namun selama periode tahun 2019-2023 mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka terbesar yaitu 0,53% dari 6,61% menjadi 6,08%. Selain Maluku, tiga Provinsi lainnya Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat. Sedangkan enam Provinsi lainnya selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan TPT dimana tertinggi terjadi Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara.

Industrialisasi secara signifikan bertanggung jawab atas peningkatan pendapatan per kapita, yang merupakan indikator utama pembangunan.

Ketimpangan pendapatan akan terjadi akibat ekspansi ekonomi jika tidak diciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Dari data-data yang ditampilkan di atas selama periode lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 – 2022 bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan terdapat hubungan negatif maupun positif terhadap ketimpangan wilayah. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik **“Disparitas Pembangunan Ekonomi antar Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua”**.

1.2. Rumusan Masalah

Tidak ada cara untuk memisahkan jumlah penduduk suatu wilayah dari pertumbuhan ekonominya. Kegiatan ekonomi dan upaya untuk membangun perekonomian bergantung pada masyarakat secara keseluruhan karena sejumlah alasan, termasuk penyediaan tenaga kerja, spesialis, eksekutif bisnis, dan wirausaha.

Sistem ekonomi yang tidak merata, seperti ketidakseimbangan lapangan kerja, berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi. Salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi adalah melalui inisiatif terencana yang meningkatkan industri tertentu. Sebaliknya, dampak manufaktur terhadap perekonomian dan lapangan kerja telah meningkat, namun dampaknya masih lebih kecil dibandingkan dampaknya.

Berdasarkan fenomena diatas yang diurai pada latar belakang, peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua?
2. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antar Provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ketimpangan wilayah antara Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
2. Untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antar wilayah di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
3. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi. Selain

itu penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai referensi pada penelitian mendatang dengan menggunakan metode yang berbeda sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam penelitian terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan kebijakan terutama dalam hal pemerataan Pembangunan ekonomi/ketimpangan wilayah.
2. Bagi Bappeda/Bappelitbangda Provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam perencanaan Pembangunan.

1.5. Kebaruan

Penelitian ini dibatasi pada lokasi di Indonesia wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Adapun data yang digunakan adalah data jumlah Penduduk, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia pada masing-masing provinsi (10 provinsi sebelum pemekaran Papua). Penelitian ini juga mengangkat topik perbandingan tingkat ketimpangan (disparitas) menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Typologi Klassen antar provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Data yang digunakan adalah data pada Tahun 2013-2022. Indikator yang diteliti melalui variabel yang dianggap berpengaruh signifikan terhadap indeks ketimpangan wilayah melalui hasil regresi data panel.